

## DAFTAR PUSTAKA

- Aimbu, L. L., Saerang, D. P. E., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*.
- Anto, R. P., & Amir, M. (2017). Competence of Village Apparatus In Management of Village Funds in North Konawe Regency-Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management Ver. VII, 19(11)*, 2319–7668.
- Arifiyadi, T. (2008). *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta.
- Arih, T. N., Rahayu, S., & Nurbaiti, A. (2017). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Manajemen Indonesia, 17(1)*.
- Awashreh, R. (2018). Palestinian NGOs: External Governance, Stakeholder, And Accountability. *Journal of Governance And Public Policy*.
- Badan\_Kepegawaian\_Negara. (2003). *Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003*.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Erlangga, ed.). Jakarta.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26(2)*, 1269–1298.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Return. *Australian Journal of Management Australian Journal of Management, 16(1)*.
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Dan Ilmu Akuntansi, 6(6)*.
- Firmanzah. (2014). Pembangunan partisipatif melalui UU Desa. Retrieved from <http://setkab.go.id/artikel-12385-.html>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim, A. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hardiningsih, P., Rachmawati Meita O, C., & Srimindarti, I. K. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang). *Jurnal AKTSAR*, 2(1), 21 – 42.
- Kantor\_Staf\_Presiden. (2015). Laporan Terpilih Minggu III November 2015. Retrieved November 1, 2019, from [http://blog.lapor.go.id/images/laporan\\_mingguan/November\\_M3.pdf](http://blog.lapor.go.id/images/laporan_mingguan/November_M3.pdf)
- Kurniawan, D., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018). *E-Proceeding of Management*, 6(1), 705–714.
- Kurniawati, M. M. H. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.
- Lewier, C. N. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi.
- Mulyana, B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1).
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Semarang*.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah\_RI. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.
- Pemerintah\_RI. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang*

*Pemerintahan Desa.*

- Pemerintah\_RI. (2008). *PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Pemerintah\_RI. (2010). *PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Pemerintah\_RI. (2014a). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.*
- Pemerintah\_RI. (2014b). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.*
- Pemerintah\_RI. (2014c). *Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Pemerintah\_RI. (2014d). *Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.*
- Putri, M. N. F. (2018). *Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri).* IAIN Surakarta.
- Ryansa., R., Yunilma, & Fauziati, P. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Universitas Bung Hatta.*
- Sande, P. (2013). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).* Universitas Negeri Padang.
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Fakultas Ekonomi. Universitas Riau.*
- Sari, R. P. (2017). Pengaruh Komunikasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Struktur Birokrasi, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Implementasi

Standar Akuntansi Pemerintah Basis AkruaI (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi). *Jurnal Universitas Negeri Padang*.

Satria, D. I., & Bobby, M. A. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 73–84.

Shende, S., & Bennet, T. (2004). Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration. *UN DESA*.

Solihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Yogyakarta: Andi Offset.

Solimun, A. A. ., Fernandes, & Nurjannah. (2017). *Permodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS*. Malang: UB Press.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukhemi. (2016). Pengaruh Aksesibilitas Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta*.

Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sundari, & Mulyadi, J. (2018). Kompetensi Pengelola Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Di Kementerian Pertahanan Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan (JRAP)*, 5(1), 26–36.

Superdi, Rasuli, M., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunjung). *JOM FEKON*, 4(1).

Sweetania, Amanda Mutiara; Caesari, Eka Pinditya Ayu; Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56.

Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tuding. *E-Journal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 51–64.

Wahyudin, A. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Pendidikan. Edisi 1*. Semarang: Unnes Press.

Wardana, I. (2016). *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang)*. Universitas Negeri Semarang.